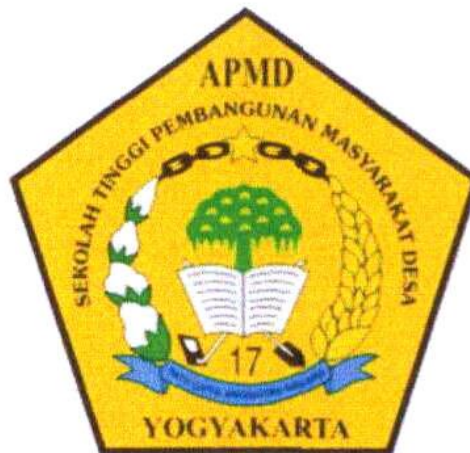


SKRIPSI

**KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA KEBUN TEH NGLINGGO**

**(Studi Kasus di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh,
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



OLEH:

**KAMELIA YANISMA TESI JANAR
19520133**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023



**KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA KEBUN TEH NGLINGGO**

**(Penelitian Deskriptif Eksploratif di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon
Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



OLEH:

KAMELIA YANISMA TESI JANAR

19520133

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Januari 2023

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D.
Ketua Penguji/ Pembimbing



Ir. Nelly Tiurmida, MPA.
Penguji Samping I



Utami Sulistiana, S.P., M.P.
Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamelia Yanisma Tesi Janar

NIM : 19520133

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA KEBUN TEH NGLINGGO”, dengan studi kasus di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Januari 2023

Penulis,



Kamelia Yanisma Tesi Janar

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas segala berkat, bimbingan, penyertaan, cinta, dan kasih-Nya yang tiada ujungnya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Kolaborasi Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Objek Wisata Kebun Teh Nglinggo”, dengan studi kasus di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan. Tentu saja terselesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena dasar itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik;
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta;
4. Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D. sebagai dosen pembimbing yang terbaik, yang telah sabar membimbing saya dengan sumbangan

pikiran, pengetahuan, gagasan serta sumbangan moral dalam penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak dan Ibu dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu pengetahuan selama perkuliahan sehingga sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Seluruh karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi;
7. Kepada pemerintah dan masyarakat Kalurahan Pagerharjo yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Untuk teman-teman senasib dan sepejuangan Angkatan 2019 STPMD “APMD”, secara khusus teman sepembimbingan yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
9. Untuk orang tua, keluarga besar, sahabat, kenalan, teman dekat penulis dan semua orang yang senantiasa berkontribusi dalam penulisan tugas akhir ini. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kalian selama proses penulisan skripsi ini; dan
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas

dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada penulis untuk proses penyelesaian skripsi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membuka diri untuk menerima kritikan dan saran dari pembaca demi mencapai kesempurnaan dan kebenaran yang semakin mendalam. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang sebagaimana yang diharapkan dalam dunia ilmiah dan akademik.

Yogyakarta, 19 Januari 2023

Penulis,



Kamelia Yanisma Tesi Janar

MOTTO

*Jatuh adalah cara Tuhan menegur kamu untuk jauh lebih bangkit berjuang.
Jangan pernah menjadi seperti orang lain, tapi jadilah versi kamu yang jauh
lebih baik.*

(Kamelia Yanisma Tesi Janar)

*Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
(Amsal 23:18)*

*Alam semesta tidak diam untuk setiap harga yang kau bayar, lewat air mata dan
keringat. Tiap tetesannya adalah bibir yang akan menjulang tinggi, mengganti
rugi semua lelahmu.*

*Saat kau berjanji sesuatu yang amat tulus, alam juga ikut bekerja
menuntaskannya.*

(J.S. Kharien)

Lawan sastra ngesti mulya

(Ki Hadjar Dewantara)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini saya mengucapkan Puji serta Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan perantaraan Bunda Maria, dan bimbingan St. Yudas Tadeus atas berkat, perlindungan, dan bimbingan-Nya mulai dari pemilihan judul sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur, bangga, dan ketulusan saya mempersembahkan karya ini sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada semua orang yang sangat baik yang ada di sekitar saya dengan cara dan dukungannya masing-masing:

1. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Martinus Janar dan Ibu Kristina Nisma Yanti atas bimbingan, kasih sayang, dan berbagai bentuk *support* yang memberikan kekuatan bagi saya dalam proses penulisan skripsi ini. Doa kecil dan sederhana kalian memberikan semangat dan kekuatan luar biasa baiknya dalam hidup saya;
2. Terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D. yang dengan setia dan antusias memberikan bimbingan, arahan, dan pencerahan sehingga sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Terima kasih kepada saudara saya kakak Fenansia Eryasari Pratama, kembaran saya Marsela Suyasti Tesa Janar, adik bungsu saya William Lapprovitola Queenzino Janar, dan teman baik saya Venansius Agung yang memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Terima kasih banyak kepada keluarga besar Ame Tadeus Jahun dan Ine Maria Nanung serta keluarga besar Nene Bapa Daniel Sangka dan Nene Mama Maria Hadia yang sudah dan senantiasa memberikan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Terima kasih banyak untuk Almamater tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang dengan caranya membantu saya baik dalam menyelesaikan tugas akhir ini maupun membantu saya dalam menunjang sehingga tercapainya cita-cita saya;

6. Terima kasih untuk semua anggota Kelompok Studi Tentang Desa (KESA) yang telah menjadi rumah kedua bagi saya untuk mampu mengembangkan cara berpikir, moral, dan semua pelajaran positif lainnya.
7. Terima kasih untuk keluarga besar Ikatan Keluarga Kolang Pacar Rego Yogyakarta (INKOPARENTA) yang mendukung saya sampai pada titik ini dengan caranya masing-masing;
8. Terimakasih kepada Dosen Utama saya yaitu Kakak Heri serta sahabat-sahabat saya Geris, Pipo, Sri, Dewi, Kakak Efa, Dela Arjo, Diego, teman-teman yang ada di kontak Whatsapp dan di akun Instagram saya yang dengan caranya masing-masing memberikan dukungan;
9. Terima kasih kepada orang tua kedua saya selama KKN, Mbah, Uti, Bunda Winda, Pak Susanto, Abang Erik, dan semua masyarakat Kalurahan Karangawen, Padukuhan Langsep yang senantiasa memberikan dukungan dan doa; dan
10. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Kos yang memberikan dukungan dengan caranya masing-masing.

INTISARI

Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kalurahan hadir untuk mengatur, mengelola, dan merawat sumber daya kalurahan termasuk objek wisata. Hal ini bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya kepada rakyat secara adil dan merata. Undang-Undang Desa menetapkan empat kewenangan kepada pemerintah kalurahan yaitu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan. Pentetapan kewenangan ini mendorong Pemerintah Kalurahan Pagerharjo untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam mengelola objek wisata Kebun Teh Nglingsgo yang selama bertahun-tahun dikelola dengan model *community-based tourism*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif. Subjek penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri dari Lurah, Carik, Panata Laksana Sarta Pangripta, Ketua Pokdarwis, Ketua Komunitas Desa Wisata, Direktur BUMKal, Anggota BPKal, dan masyarakat Kalurahan Pagerharjo. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglingsgo dilakukan dengan berbasis pada komunikasi yang intensif dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo khususnya Dinas Pariwisata yang dilakukan saat musyawarah kalurahan. Di samping membangun komunikasi dengan masyarakat, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo juga melakukan negosiasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Negosiasi ini bertujuan agar Pemerintah Kalurahan Pagerharjo dapat melibatkan diri dalam pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglingsgo. Komunikasi dan negosiasi ini membuahkan hasil yang positif yaitu terbitnya *Memorandum of Understanding* tentang pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglingsgo pada tahun 2022. *Memorandum of Understanding* tersebut menegaskan bahwa objek wisata Kebun Teh Nglingsgo dikelola secara bersama oleh masyarakat, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. *Kedua*, sejak terbitnya *Memorandum of Understanding* tersebut, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo mulai terlibat dalam pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglingsgo melalui BUMKal. BUMKal memperoleh kuasa dan kewenangan untuk mengelola tiket wisata. Dalam pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglingsgo, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo membentuk relasi kemitraan dengan Pokdarwis dan Komunitas Desa Wisata. Relasi kemitraan ini berbasis pada komunikasi yang intensif. Pokdarwis dan Komunitas Desa Wisata berkedudukan sebagai pengelola teknis objek wisata Kebun Teh Nglingsgo. Sementara itu, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo menjalankan fungsi *public regulation* dengan mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada pelestarian objek wisata. *Ketiga*, pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglingsgo dihadapkan pada berbagai kendala yaitu: infrastruktur jalan yang belum memadai, keterbatasan dana, dan SDM yang belum memadai.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pemerintah Kalurahan, dan Masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Akademis.....	10
E. Fokus Penelitian	11
F. Literatur Review	12
G. Kerangka Konseptual	20
H. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Objek Penelitian.....	31
3. Subjek Penelitian	32
4. Lokasi Penelitian.....	33
5. Teknik Pengumpulan Data	33
6. Teknik Analisis	36
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	40
BAB II. GAMBARAN UMUM KALURAHAN PAGERHARJO DAN	42
OBJEK WISATA KEBUN TEH NGLINGGO.....	42

A. Profil Kalurahan Pagerharjo	42
1. Sejarah Kalurahan Pagerharjo	42
2. Keadaan Geografis	44
3. Keadaan Demografi	46
4. Kondisi Sarana dan Prasana	54
5. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Pagerharjo	60
6. Kondisi Badan Permusyawaratan Kalurahan Pagerharjo	66
B. Profil Kebun Teh Nglingga	68
1. Sejarah Kebun Teh Nglingga	68
2. Kondisi Objek Wisata Kebun Teh Nglingga	70
3. Keadaan Geografis	72
4. Kondisi Sarana dan Prasarana	73
5. Struktur Kepengurusan Objek Wisata Kebun Teh Nglingga	74
BAB III. KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA KEBUN TEH NGLINGGO	75
A. Pengelolaan Objek Wisata Kebun Teh Nglingga oleh Pokdarwis	88
B. Pengelolaan Objek Wisata Kebun Teh Nglingga oleh Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Pagerharjo	92
C. Relasi Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Pagerharjo dalam Pengelolaan Objek Wisata Kebun Teh Nglingga	115
D. Kendala-Kendala Pengelolaan Objek Wisata Kebun Teh Nglingga	129
BAB IV PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
PEDOMAN WAWANCARA	143
LAMPIRAN DOKUMENTASI	156

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Deskripsi Subjek Penelitian	32
Tabel II.1	Luas Wilayah	45
Tabel II.2	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel II.3	Penduduk Berdasarkan Usia	48
Tabel II.4	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel II.5	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	51
Tabel II.6	Penduduk Berdasarkan Agama	53
Tabel II.7	Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	54
Tabel II.8	Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	56
Tabel II.9	Sarana Kesehatan	57
Tabel II.10	Sarana dan Prasarana Olahraga	58
Tabel II.11	Sarana dan Prasarana Ibadah	59
Tabel II.12	Struktur Pemerintah Kalurahan Pageharjo	60
Tabel II.13	Struktur BPKal Pageharjo	67
Tabel II.14	Struktur Pengurus Desa Wisata Nglinggo.....	74

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 Struktur Pemerintahan Kalurahan Pageharjo	65
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menyimpan beragam potensi. Salah satu potensi unggulan Indonesia adalah sektor pariwisata. Dengan kenyataan seperti ini, pemerintah mencoba meningkatkan pembangunan di sektor pariwisata. Komitmen untuk membangun sektor pariwisata sebetulnya berangkat dari penilaian bahwa pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu dampak positif pembangunan sektor pariwisata adalah dapat menyediakan lapangan pekerjaan.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan kalimat lain, pariwisata dapat dijadikan sebagai salah satu motor penggerak kegiatan ekonomi rakyat. Pembangun pariwisata dapat menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar yang ditandai dengan timbulnya usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejauh ini, pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan perekonomian negara. Pariwisata dinilai dapat menjadi penghasil devisa negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan atau perolehan devisa negara dari kontribusi sektor pariwisata adalah pajak. Pajak tersebut didapatkan ketika wisatawan mancanegara tersebut melakukan transaksi perjalanan wisata. Hal ini terjadi karena wisatawan mancanegara menjadikan Indonesia sebagai salah satu

tujuan utama destinasi pariwisata. Selain wisatawan asing, wisatawan nusantara juga terkena pajak pariwisata. Sebab sektor pariwisata di Indonesia tidak hanya menarik perhatian wisatawan mancanegara saja tetapi juga wisatawan nusantara.

Sumbangan devisa negara yang diberikan oleh sektor pariwisata terbilang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena pajak yang didapatkan dari sektor pariwisata cukup besar. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa yang cukup besar bagi Indonesia yaitu sebesar US\$ 20 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 20% jika dilihat dari tahun 2017 yang sekitar US\$ 16,8 miliar. Dengan begitu, sektor pariwisata dapat berpotensi untuk berkembang di Indonesia (Pratama dan Kurnia, 2018: 1015).

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata merupakan langkah yang bagus dalam mengoptimalkan potensi yang ada di Indonesia. Dengan adanya komitmen semacam ini, daerah-daerah yang belum melirik sektor pariwisata sebagai hal yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat termotivasi untuk menjadikan daerahnya sebagai destinasi wisata. Hal ini disebabkan karena pariwisata dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu daerah yang memfokuskan diri pada pembangunan pariwisata. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melihat pariwisata sebagai salah satu sektor yang mampu menyokong

peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus Pendapatan Asli Desa (PAD). Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo meyakini bahwa pembangunan pariwisata dapat memicu masyarakat untuk semakin kreatif dalam mengembangkan berbagai usaha ekonomi. Pembangunan pariwisata dapat mendorong masyarakat untuk bergelut dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Singkatnya, pariwisata mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Lebih dari itu, pariwisata dapat berkontribusi dalam meningkatkan PAD.

Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi wisata yang sudah dan akan berkembang pesat dalam tata kelola pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2017 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kulon Progo mencapai 626.876 orang. Para wisatawan ini biasanya mengunjungi beberapa objek wisata seperti Pantai Glagah, Waduk Sermo, Kalibiru, Puncak Suruloyo, Goa Kiskendo, Kebun Teh Nglinggo, dan objek wisata lainnya. Dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kulon Progo, sebagian besar wisatawan menaruh minat yang besar untuk mengunjungi objek wisata Kebun Teh Nglinggo dengan wisatawan sebanyak 52.436 orang (Nuringsih, dkk 2018: 332).

Kebun Teh Nglinggo merupakan objek wisata yang terletak di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebun Teh Nglinggo sudah ada sejak lama, bahkan sudah belasan tahun silam. Dahulunya kebun teh ini merupakan kebun teh

biasa, tetapi terdapat kelompok tani yang berinisiatif untuk menjadikan Kebun Teh Nglingga menjadi tempat wisata. Para petani menyulap kebun teh yang pada awalnya hanya dimanfaatkan hasil perkebunannya menjadi tempat wisatawan untuk berkunjung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penghasilan para petani teh tradisional. Karena selain mendapatkan penghasilan dari daun teh, para petani juga mendapat penghasilan dari wisatawan.

Salah satu keistimewaan Kebun Teh Nglingga adalah adanya spot gardu pandang yang biasa digunakan untuk menikmati panorama Bukit Ngisis. Para wisatawan juga bisa menikmati wisata *off-road*. Jika wisatawan hendak menginap untuk berburu *sunrise* atau menikmati suasana pagi hari di perkebunan teh, pengelola wisata telah menyediakan *homestay* rimbono yang lengkap dengan tempat tidur dan toilet yang bersih. Pemilik *homestay* pun akan mempersiapkan makanan tradisional khas daerah Samigaluh. Di seputar Kebun Teh Nglingga juga tersedia warung-warung kecil yang menyediakan makanan dan minuman ringan (Silvianti, 2018: 7).

Selama ini, pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglingga menggunakan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). *Community based tourism* merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan serta melindungi kehidupan sosial budayanya. Konsep pariwisata berbasis masyarakat berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan

(*sustainable tourism*) yang memerlukan partisipasi masyarakat (Baskoro, 2008: 43). Jadi, pariwisata berbasis masyarakat mengedepankan pendekatan *bottom up*, sedangkan pariwisata berkelanjutan mengedepankan *top down*.

Pada awalnya, pengembangan Kebun Teh Nglingsgo dilakukan dengan berbasis pada swadaya masyarakat melalui kerja bakti dan gotong royong. Melalui swadaya, masyarakat berhasil membangun berbagai fasilitas seperti gapura, gazebo, gardu pandang, dan area parkir. Sejak tahun 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pariwisata mulai terlibat dalam pengembangan Kebun Teh Nglingsgo. Pada waktu itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo memberikan izin agar area seluas 4 hektar dibuka sebagai area wisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo kemudian memberikan mandat kepada Pokdarwis untuk mengelola Kebun Teh Nglingsgo. Untuk mendukung daya tarik wisatawan, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo menggelar kesenian tradisional Lengger Topeng, Tayup Topeng, dan Jatilan (Nurningsih, dkk. 2018: 336).

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo melakukan pembinaan terhadap aktor pengelola objek wisata Kebun Teh Nglingsgo agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar serta mengurangi pengangguran. Dinas Pariwisata Kulon Progo secara intensif melakukan peningkatan SDM pengelola, mulai dari pelatihan kuliner, pemandu wisata, pelayanan prima, hingga pengelolaan *homestay* dan melakukan pendampingan dalam menyusun paket wisatawan manajemen, promosi di media sosial, dan membantu promosi dalam berbagai kegiatan.

Sampai saat ini, objek wisata Kebun Teh Nginggo di Kalurahan Pagerharjo masih berada di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pariwisata. Objek wisata Kebun Teh Nginggo memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo. Hal ini terjadi karena biaya retribusi objek wisata Kebun Teh Nginggo tersebut hanya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Jika dicermati secara singkat, cerita tentang pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nginggo, tampaknya berjalan pada koridor yang benar. Meskipun demikian, pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nginggo masih menimbulkan kontradiksi. Kontradiksi itu terjadi karena pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nginggo meminggirkan kalurahan sebagai subjek pembangunan. Pengelolaan objek wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo mengindikasikan bahwa Kalurahan Pagerharjo tidak mengambil keuntungan apa-apa dari keberadaan objek wisata Kebun Teh Nginggo tersebut terutama untuk menyokong Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl). Jadi, sekalipun objek wisata Kebun Teh Nginggo merupakan bagian dari potensi Kalurahan Pagerharjo, tetapi kalurahan kehilangan kewenangan untuk mengatur, memproteksi, merawat, dan mengelola potensi tersebut. Jadi, bahkan setelah kehadiran Undang-Undang Desa, pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nginggo belum beralih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan Pagerharjo.

Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kalurahan hadir untuk mengatur, mengelola, dan merawat sumber daya termasuk objek wisata. Hal ini bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya kepada rakyat secara adil dan merata. Undang-Undang Desa menetapkan empat kewenangan kepada kalurahan yaitu menyelenggarakan pemerintahan, membangun, memberdayakan, dan membina masyarakat kalurahan. Hal ini memberi makna bahwa pemerintah kalurahan berhak untuk mengatur dan mengurus bagian dari hak dan kewenangan kalurahan dan kewenangan lokal berskala kalurahan termasuk mengelola *common pool resources* seperti objek wisata. Oleh karena itu, pasca Undang-Undang Desa, pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglinggo seharusnya melibatkan kalurahan sebagai subjek pembangunan.

Di bawah kepemimpinan Widayat, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo menyadari mandat Undang-Undang Desa. Karena itu ia berikhtiar untuk menjadikan Pemerintah Kalurahan Pagerharjo sebagai institusi sekaligus aktor yang hadir bersama masyarakat untuk mengelola objek wisata Kebun Teh Nglinggo secara bersama. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) guna menyokong tata kelola pemerintahan dan pembangunan Kalurahan Pagerharjo. Jadi, di bawah kepemimpinan Widayat, pemerintah bersama masyarakat Kalurahan Pagerharjo hendak menyusun agenda kolektif dan kolaboratif untuk mengelola objek wisata Kebun Teh Nglinggo sehingga memberi manfaat bagi Kalurahan Pagerharjo.

Dalam upaya untuk memaksimalkan potensi wisata, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo mengedepankan komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah Kalurahan Pagerharjo memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi wisata yang ada di Kalurahan Pagerharjo. Dalam sosialisasi tersebut, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo menunjukkan kepada masyarakat potensi wisata yang sudah berhasil diidentifikasi. Adapun potensi wisata yang sudah berhasil diidentifikasi yaitu wisata alam, wisata buatan, dan wisata kerakyatan. Pemerintah Kalurahan Pagerharjo juga menggandeng Pokdarwis untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan objek wisata. Sosialisasi dan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan objek wisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya sekaligus meningkatkan PAKal. Dengan demikian, keberadaan objek wisata tersebut memberi dampak yang signifikan bagi Kalurahan Pagerharjo.

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi wisata di Kalurahan Pagerharjo mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Adanya tanggapan positif dari masyarakat menandakan bahwa pendekatan komunikasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Pokdarwis berhasil memicu kesadaran masyarakat agar mengelola potensi wisata secara maksimal. Masyarakat menginginkan agar seluruh sumber daya bersama termasuk objek wisata dikelola secara bersama dan maksimal sehingga menarik wisatawan untuk berwisata ke Kalurahan Pagerharjo. Dengan begitu, perekonomian masyarakat akan meningkat. Di lain pihak, PAKal juga akan meningkat.

Pendekatan komunikasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan menghasilkan kesepakatan bahwa pengelolaan potensi wisata dilakukan secara bersama melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Di samping membangun kesepakatan dengan masyarakat, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo juga melakukan negosiasi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo khususnya Dinas Pariwisata agar melibatkan kalurahan dalam pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglingsgo. Negosiasi tersebut membuahkan hasil yang positif yaitu terbina nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglingsgo pada tahun 2022. *Memorandum of Understanding* itu menegaskan bahwa objek wisata Kebun Teh Nglingsgo dikelola secara bersama oleh masyarakat, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo, dan Dinas Pariwisata melalui Pokdarwis. Jadi, *Memorandum of Understanding* tersebut hendak menekankan *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata di Kalurahan Pagerharjo.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglingsgo. Oleh karena itu, penelitian ini secara tegas hendak mengungkap “Kolaborasi Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Kebun Teh Nglingsgo: Studi kasus di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Untuk melacak pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglinggo, penelitian ini dipandu oleh perspektif *Governance* sebagaimana yang diajarkan oleh Mazhab Timoho. Perspektif *Governance* digunakan karena sampai batas tertentu penelitian ini berbicara tentang interaksi atau relasi antaraktor dalam pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglinggo. Penelitian ini berbicara tentang *collaborative governance* antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah penting dalam penelitian ini adalah bagaimana *collaborative governance* pemerintah dan masyarakat Kalurahan Pagerharjo mengelola objek wisata Kebun Teh Nglinggo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan *collaborative governance* pemerintah dan masyarakat Kalurahan Pagerharjo dalam mengelola objek wisata Kebun Teh Nglinggo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi-studi mengenai relasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola potensi

kalurahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kalurahan Pagerharjo agar mengelola kewenangan Kalurahan secara maksimal, sehingga Kalurahan Pagerharjo mampu menjadi entitas yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis.

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan.

Menurut Sugiyono (2017: 207), pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan. Fokus penelitian ini meliputi:

1. Pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglongo oleh Pokdarwis;
2. Pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglingo oleh pemerintah dan masyarakat Kalurahan Pagerharjo;

3. Relasi pemerintah dan masyarakat Kalurahan Pagerharjo dalam pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglingga; dan
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglingga.

F. Literatur Review

Pada dasarnya, penelitian tentang pengelolaan objek wisata bukanlah sesuatu yang baru. Peneliti-peneliti terdahulu telah berupaya mengungkap pengelolaan objek wisata di berbagai daerah. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berupaya untuk mengungkap tentang pengelolaan objek wisata adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Anggi Hermansyah pada tahun 2019 yang berjudul *Pengelolaan Objek Wisata Citumang oleh Karang Taruna Desa Bojong dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Bojong Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata Citumang oleh Karang Taruna Desa Bojong pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan metode pengelolaan objek wisata seperti *planning, directing, organizing*, dan *controlling*. Namun terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh Karang Taruna dalam mengelola objek wisata Citumang berupa belum adanya pengawasan yang rutin dilakukan oleh pemerintah desa, belum adanya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Karang Taruna sehingga pemerintah harus turun tangan atas kejadian yang kurang baik yang menimpa objek wisata Citumang, kurangnya penyertaan modal dalam

pembangunan objek wisata Citumang serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya dari masing-masing anggota Karang Taruna. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh semua pihak di dalamnya termasuk Karang Taruna dengan member pengarahan kepada masing-masing anggota Karang Taruna terhadap tugas dan fungsinya, mencari dan dalam menunjang pembangunan objek wisata Citumang. Begitu juga dengan pemerintah desa yang akan melakukan pengawasan rutin ke lokasi objek wisata Citumang.

Kedua, penelitian Ahmad Nawawi pada tahun 2013 yang berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata pantai Depok secara administratif masih disatukan oleh Pemda Kabupaten Bantul dengan kawasan wisata lain yang ada di Desa Parangtritis. Pengelolaan wisata Pantai Depok diwujudkan dengan mendirikan Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Pantai Depok. Koperasi ini merupakan wadah organisasi masyarakat yang ada di pesisir Pantai Depok. Sebagian besar masyarakat yang bergabung dalam koperasi ini adalah masyarakat yang berada di sekitar Pantai Depok. Hal ini merupakan kebijakan koperasi yang hendak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata di Pantai Depok.

Ketiga, penelitian Eka Marlina pada tahun 2019 yang berjudul *Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Cikupa, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata Air Panas

guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis pada umumnya sudah dilaksanakan. Namun, pengelolaan objek wisata Air Panas masih dihadapkan pada beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang muncul berupa belum ada realisasi dalam pertemuan sebelumnya dengan Dinas Pariwisata, tidak ada kesepakatan dalam penyusunan visi dan misi pembangunan pariwisata antara pemerintah desa dan masyarakat, kurangnya dana untuk pembangunan fasilitas dan kegiatan pariwisata, pemilik warung tidak mempunyai penghasilan yang tetap, kualitas sumber daya manusia masih rendah. Upaya-upaya yang dilakukan berupa meningkatkan komunikasi dengan Dinas Pariwisata, sering melakukan sharing dengan masyarakat, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengenai pembangunan objek wisata, mencari investor dan bantuan dari pemerintah daerah, merekrut sumber daya manusia kompeten, menyusun secara tertulis kebijakan tarif masuk ke objek wisata serta visi dan misi pembangunan pariwisata, mendorong wisatawan untuk mempromosikan objek wisata.

Keempat, penelitian Fero Christania Paendong, Johny H. Posumah, dan Rully Mambo pada tahun 2022 yang berjudul *Dampak Pengelolaan Objek Wisata Bukit Kasih pada Pendapatan Masyarakat di Desa Kanonang Empat Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata Bukit Kasih memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kanonang Empat. Dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kanoang Empat adalah terbukanya

peluang usaha sehingga memberi dampak pada pendapatan masyarakat. Keberadaan objek wisata Bukit Kasih mampu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Desa Kanonang Empat. Dengan demikian, keberadaan objek wisata Bukit Kasih berkontribusi mengurangi pengangguran di Desa Kanonang Empat. Sementara itu, dampak negatif pengelolaan objek wisata Bukit Kasih yaitu banyaknya lahan pertanian yang tidak diolah masyarakat karena masyarakat lebih memilih untuk bekerja dan berusaha di objek wisata Bukit Kasih. Akibatnya, hasil pangan masyarakat menjadi menurun. Selain itu, terjadinya perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat karena adanya pengaruh budaya luar.

Kelima, penelitian Mira Janu Yustisi pada tahun 2018 yang berjudul *Analisis Stakeholders dalam Pengelolaan Objek Wisata Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Pihak Kecamatan Pemenang, Pemerintah Desa Gili Indah, Koperasi Karya Bahari, Asosiasi pengusaha Gili Trawangan (Hotel, Bungalow, Dive Shop, Restoran), Gili Ecotrust, Karang Taruna, Yayasan Pemerhati Penyu, Kelompok Buruh, dan Koperasi Janur Indah. Hubungan antarstakeholder dalam pengelolaan objek wisata Gili Trawangan belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari empat aspek, yaitu: 1) komunikasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan konflik di antara para *stakeholder*; 2) kurangnya kerjasama antaraktor (pemerintah, swasta dan masyarakat). Kerjasama yang dilakukan

hanya dalam bentuk kegiatan semata yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara tertulis; 3) koordinasi yang terjadi hanya ketika akan dilakukannya kegiatan atau dijalankannya sebuah kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Kebijakan tersebut hanya ditentukan oleh para ahli yang merupakan representasi pemerintah saja; 4) kolaborasi yang dilakukan hanya terkait dengan kegiatan atau event-event pariwisata dan promosi pariwisata. Kolaborasi pun hanya melibatkan dua aktor yakni pemerintah dan swasta.

Keenam, penelitian Data Wardana, Zainal, dan Arwanto Harimas Ginting pada tahun 2020 dengan judul *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya strategi pengembangan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan objek wisata alam Teluk Jering. Adapun hambatan yang terjadi dalam pengembangan objek wisata alam Teluk Jering yaitu bahwa masyarakat lokal tidak ingin objek wisata ini dikelola oleh pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa pengelolaan objek wisata Teluk Jering oleh pemerintah hanya akan mengurangi pendapatan masyarakat lokal tersebut. Selain itu, pemerintah belum mempunyai kebijakan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pengembangan objek wisata.

Ketujuh, penelitian Dwian Hartomi Akta Padma Eldo dan Azra Prabowo pada tahun 2020 yang berjudul *Strategi Pengelolaan Objek Wisata Mangrove Pandansari sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam mengoptimalkan Objek Wisata Pandansari sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Budaya belum efektif dalam melakukan koordinasi dan arahan dengan pihak pengelola objek wisata (kelompok masyarakat setempat).

Kedelapan, penelitian Renalde Pit Serang, Frans Singkoh, dan Josef Kairupan pada tahun 2018 yang berjudul *Pengelolaan Objek Wisata Pantai Baliranggeng oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam prioritas pengelolaan kepariwisataan melalui dukungan alokasi anggaran masih minim. Akibatnya, pengembangan objek wisata khususnya dalam pembangunan infrastruktur pariwisata belum maksimal. Selain itu, promosi kepariwisataan belum efektif karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, pamphlet, ataupun pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website. Sejauh ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum mempunyai website khusus.

Kesembilan, penelitian Tunggul Prasodjo pada tahun 2017 yang berjudul *Pengembangan Pariwisata Budaya dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata budaya merupakan salah satu objek pariwisata yang cukup menarik perhatian wisatawan dewasa ini. Kunjungan

ke objek wisata budaya selain disebabkan oleh adanya rasa ingin tahu dan penasaran, sekaligus juga untuk menemukan nilai etika dan estetika dari tempat dan budaya lain yang berbeda dengan seorang/kelompok wisatawan tersebut. Di samping kelengkapan sarana dan daya dukung lain yang dapat menarik wisatawan, kemampuan administrasi yang baik dan pelayanan yang memadai dapat menjadi tolak ukur kemajuan sektor atau objek wisata budaya tersebut. Kemampuan pengelolaan administrasi yang dimaksud dalam hal ini lebih mengarah pada kemampuan manajemen pengelola pariwisata tersebut baik untuk menginventarisir semua objek inti dan pelengkap dari wisata budaya tersebut, sekaligus menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan wisatawan untuk menjangkau objek wisata itu. Kaitannya dengan perlunya inventarisasi kebutuhan wisatawan secara administratif, berhubungan erat juga dengan kebutuhan pelayanan, dalam konteks ini dapat disebut sebagai pelayanan terhadap wisatawan publik. Pelayanan yang baik oleh pengelola pariwisata akan berbanding lurus dengan perkembangan objek wisata tersebut. Selain itu, guna menguatkan daya tarik bagi wisatawan yang lebih luas, maka diperlukan sistem pemasaran yang lebih elegan dan sesuai dengan perkembangan tren masa kini, salah satunya dengan menggunakan media internet.

Kesepuluh, penelitian Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga pada tahun 2016 yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih dominan

berperan sebagai fasilitator ketimbang sebagai motivator dan dinamisator. Peran sebagai fasilitator ini terlihat terutama pada hal penyediaan sarana prasarana objek wisata yang sebagian besar masih ditanggung oleh Dinas, fasilitas penyaluran bantuan dana stimulan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan sebuah objek wisata, upaya promosi obyek wisata, serta fasilitas yang diberikan pada pihak ketiga seperti investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usaha wisatanya di Kabupaten Tapanuli Utara.

Secara umum, kesepuluh penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada topik penelitian dimana baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini berupaya untuk mengungkap interaksi antaraktor dalam pengelolaan objek wisata. Namun, kesepuluh penelitian terdahulu tetap memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini secara khusus membahas dan menjelaskan relasi pemerintah kalurahan dengan masyarakat dengan menggunakan paradigma *collaborative governance*.

Selain itu yang menjadi pembeda adalah dari sisi teori atau perspektif yang digunakan. Penelitian ini dipandu oleh teori *Governance* sebagaimana yang telah diajarkan oleh Mazhab Timoho. Dengan memakai teori *Governance*, penelitian ini hendak membongkar relasi pemerintah kalurahan dengan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata.

G. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dipandu oleh perspektif *Governance* sebagaimana yang diajarkan oleh Mazhab Timoho. *Governance* yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah *governance* yang diajarkan oleh pemikir-pemikir neoliberal. *Governance* yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah *governance* dalam pengertian “*governance without government*” maupun “*good governance*”. Dua mantra ini bersifat normatif yang hendak “melubangi pemerintah negara”. Selain itu, secara keilmuan, kedua mantra ini tidak sanggup memberi daya interpretasi dan eksplanasi terhadap praktik pemerintahan. Karena itulah, Giliberto Capano, Michael Howlett dan M Ramesh (2005) meyerukan “*bringing government back in*” untuk merepons kegagalan *governance*. Mereka memiliki argumen kuat untuk mendukung pandangan bahwa pemerintah terus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan dan bahwa jika fakta ini tidak dipertimbangkan maka persepsi risiko tata kelola (*governance*) ditambahkan pada pandangan yang normatif atau perspektif tanpa basis empiris yang memadai.

Governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah *governance* dalam pengertian meta-*governance* yang tidak bias teknokratik-neoliberal. Jadi, *governance* dalam penelitian ini bukan berbicara tentang “*governance without government*”, melainkan “*government with governance*”. Jika mengikuti logika Mazhab Timoho, secara sederhana, *governance* berbicara tentang interaksi atau relasi antara pemerintah dengan pihak luar. Pemerintah tanpa *governance* atau interaksi dengan pihak luar, akan menjadi otokratik-

birokratik seperti dunia perkantoran. Sebaliknya, “*governance with government*” akan membuat pemerintahan seperti dunia pasar (Sutoro Eko, 2021: 15).

Menurut *governance*, pemerintahan adalah proses interaksi dan proses konstitutif antara pemerintah dengan masyarakat (politik, ekonomi, sipil) agar tidak terjebak pada pemerintahan sebagai perkantoran. Konsep *governance* dipahami sebagai tata pemerintahan yang di antaranya adalah interaksi antara pemerintah-negara dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (Sutoro Eko, 2020: 1). *Governance* adalah kondisi, aktivitas, kegiatan dalam melaksanakan pemerintahan atau suatu proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara, pembangunan masyarakat, ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan privat atau swasta. Konsep *governance* merujuk pada pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama terkait pengaturan proses pemerintahan dengan pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun warga masyarakat. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi negosiasi, kolaborasi, konsolidasi, partisipasi, transparansi, responsivitas, rente, privatisasi, rente, *free rider*, bandit, dll (Sutoro Eko, 2020: 2).

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat dibutuhkan dalam pengelolaan objek wisata. dalam pengelolaan objek wisata, pemerintah dan masyarakat dapat memainkan perannya masing-masing. Oleh karena itu, pengelolaan

objek wisata memerlukan partisipasi antarsektor terutama pemerintah dan masyarakat.

Pada umumnya, pengelolaan objek wisata merupakan tanggung jawab pemerintah. Menurut Sutoro Eko (2021), pemerintah (*Government*) adalah *supreme authority* dalam arena pemerintahan seperti negara. Pemerintah bukan pemimpin, penguasa, biokrasi, negara, atau sektor publik. Pemerintah adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama parlemen.

Lebih lanjut, Sutoro Eko (2021) menjelaskan beberapa makna tentang pemerintah. *Pertama*, pemerintah sebagai subjek. Jika mengikuti logika idealisme konstitusional-demokratis, maka yang memerintah adalah pemerintah beserta parlemen yang hadir sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat. Namun, realisme melihat bahwa siapa yang memerintah tidak mesti pemerintah. Karena secara *de facto* ada banyak subjek yang memerintah, seperti negara, birokrat, konsultan, teknokrat, dan perangkat. Pemerintah sebagai subjek memiliki makna idealisme filosofis yang dalam. Dari Karl Polanyi (1994), kita tahu bahwa pemerintah dibuat untuk keperluan distribusi dan proteksi, terutama perlindungan orang-orang lemah dari rampasan kaum elite. Pemerintah dibentuk oleh rakyat dan pemerintah bekerja untuk membebaskan warga sebagai pemilik negara.

Konsep pemerintah mengacu pada subjek yang memberikan atau menjalankan pemerintahan. Subjek tersebut dapat berupa pribadi (misalnya Kepala Desa, Bupati/Wali kota, Gubernur dan Presiden) atau lembaga (misalnya Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi eksekutif saja, sedangkan dalam arti yang luas meliputi eksekutif dan legislatif.

Kedua, pemerintah dan predikat dan objek. Selain berkaitan dengan subjek, pemerintah juga berkaitan dengan predikat dan objek yaitu apa dan siapa yang diperintah. Kata “apa” yang diperintah memiliki elemen luas tidak hanya berbicara perkantoran dan administrasi atau pagar kantor bupati, tetapi kata “apa” sejatinya berbicara tentang hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak mengandung relasi kuasa antara pemerintah dengan orang-orang yang berkepentingan, misalnya; berbicara terkait beras maka akan bertemu bermacam-macam aktor seperti petani, tengkulak, pedagang, dan konsumen. Kata “siapa” yang diperintah adalah negara, warga, dan masyarakat. Lalu, kata “di mana” menyebut tempat atau arena bagi proses memerintah baik pada bentuk komunitas, desa, daerah, negara, dan dunia.

Ketiga, pemerintah dalam masyarakat. Pemerintah dalam masyarakat (*local self-government*) yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) pada dasarnya bukan sekedar menyelenggarakan negara (yang lebih bermakna *ordering the state*) melainkan memerintah negara (*governing the state*) agar “negara hadir” memberikan distribusi dan proteksi kepada warga sekaligus memaksa warga untuk patuh kepada hukum. Pemerintah lebih mungkin efektif ketika mereka dapat menghasilkan persetujuan bersyarat, atau setidaknya kepatuhan semu sukarela (Margaret Levi, 2006).

Pemerintah dalam masyarakat adalah milik rakyat, yang dibentuk cara politik oleh rakyat. Rakyat adalah konsep politik. Negara adalah milik warga. Warga adalah subjek hukum yang memiliki persamaan hak-kewajiban terhadap negara. Pemerintah bukan sekadar penyelenggara negara. Pemerintah berbeda dengan negara. Birokrasi adalah *the real state*. Negara bersifat statis yang tidak berhubungan dengan demokrasi, melainkan berhubungan dengan sentralisasi, birokratisasi, unifikasi, dan koersi. Demokrasi berada pada ranah pemerintah, yang membuat pemerintah lebih dinamis dalam melakukan tindakan politik dan membuat hukum. Hukum bukan hanya membatasi kekuasaan, tetapi ia adalah ekspresi kehendak politik dan otot besar pemerintah (*the great sinew of government*) untuk memerintah negara.

Pemerintah merupakan salah satu elemen dari negara. Artinya, pemerintah menjadi bagian dari negara. Pemerintah merupakan sebagai aktor-insitusi yang menyelenggarakan negara. Hal yang paling fundamental harus dipahami adalah pemerintah dan negara merupakan dua insitusi yang berbeda. Pemerintah bersifat dinamis, silih berganti secara berkala sedangkan negara bersifat statis dan permanen, kecuali bubar dan pecah-pecah. Pemerintah jika diartikan adalah sebagai insitusi dan arena berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan. Dalam negara modern, pemerintah sering diartikan sebagai otoritas tertinggi (*supreme authority*) yang menyelenggarakan, memerintah, mengatur, mengurus negara, termasuk untuk mencapai tujuan negara yang digariskan dalam konstitusi.

Tugas pemerintah adalah memerintah negara, agar negara melindungi dan melayani warganya. Secara esensial pemerintah memiliki dua fungsi yaitu: *Pertama*, melindungi (*protection*). Dalam konteks ini, tentunya yang dilindungi adalah rakyatnya. Contohnya, pemerintah harus melindungi rakyat dari rampasan dan penindasan elite (*elite capture*) atau petani yang dirampas haknya oleh tengkulak. *Kedua*, membagi (*distributing*). Hal ini berarti bahwa pemerintah yang sudah mengumpulkan sumber daya, baik pajak, hibah, pendapatan bagi hasil dan lain sebagainya lalu dibagikan kepada rakyat. Pemerintah sejatinya merupakan aktor-institusi yang kuat, dimana yang memerintah haruslah pemerintah, bukan birokrat dan teknokrat serta bukan pasar.

Dengan mengikuti penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pemerintah kalurahan adalah aktor sekaligus institusi yang berwenang dan mempunyai hak untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sementara itu, mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna, yaitu: *Pertama*, mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat pihak-pihak yang berkepentingan. *Kedua*, bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. *Ketiga*, memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dana, peralatan, maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumber daya kepada penerima

manfaat. *Keempat*, mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat pelayanan publik (*public goods*) yang telah diatur tersebut.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah kalurahan mempunyai tiga fungsi, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat (Sutoro Eko, 2015: 101-103).

Sebagaimana yang telah disinggung di muka, pada umumnya pengelolaan objek wisata merupakan tanggung jawab pemerintah termasuk pemerintah kalurahan. Akan tetapi, ketika kebutuhan masyarakat akan pelayanan pariwisata semakin meningkat, hal tersebut tidak diimbangi oleh peran pemerintah. Dalam banyak hal, pemerintah mengalami keterbatasan untuk mengelola potensi wisata. Oleh karena itu, kehadiran pihak-pihak yang mampu mengakomodasi kebutuhan wisatawan sangat diperlukan.

Pada saat ini, pembangunan sektor pariwisata telah menjadi salah satu primadona pemerintah termasuk pemerintah kalurahan. Pendekatan yang dipakai dalam pembangunan pariwisata adalah pembangua pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan

pengembangan wisata dengan memperhatikan minat wisatawan dan keterlibatan langsung dari masyarakat lokal dengan menjaga kestabilan lingkungan dalam pengelolaan wisata yang berorientasi jangka panjang. Hal ini dilakukan guna untuk memenuhi aspek ekonomi, sosial, dan estetika serta menjaga keutuhan ekologi, keanekaragaman hayati, budaya dan sistem kehidupan. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata memerlukan partisipasi dari setiap elemen termasuk masyarakat.

Pembangunan pariwisata akan berhasil apabila melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat akan memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya (Hamidah, 2013: 191). Dengan kalimat lain, pengelolaan potensi wisata akan maksimal apabila ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mencapai keputusan kolektif. Dengan kolaborasi, hubungan antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat semakin dekat, komunikasi semakin intensif, serta mengaburkan batas-batas organisasi (Fairuza, 2017: 193). Jadi, pengelolaan objek wisata perlu ditopang oleh pendekatan *collaborative governance*.

Collaborative governance merupakan basis alternatif yang dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan pariwisata. *Collaborative governance* merupakan paradigma baru yang digunakan untuk menghadapi isu yang beragam dalam masyarakat yang kompleks. Pada dasarnya, paradigma ini menekankan kesetaraan hubungan di antara pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat. Jadi, *collaborative governance*

merupakan pendekatan yang berikhtiar untuk memberi kesempatan bagi *stakeholder* untuk terlibat dalam pengelolaan objek wisata demi mencapai tujuan bersama.

Collaborative governance merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik dengan tujuan mendapatkan sumber daya guna melaksanakan pembangunan sesuai harapan para pemangku kepentingan (Sambodo dan Pribadi, 2016: 193). Perspektif *collaborative governance* telah banyak digunakan untuk memecahkan masalah di tingkat lokal karena adanya keterbatasan pemerintah lokal dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya. *Collaborative governance* merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan sehingga kekuasaan tidak hanya berpusat pada pemerintah.

Collaborative governance bertujuan untuk memecahkan masalah atau isu tertentu dari pihak tertentu. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah melainkan juga masyarakat sipil. *Collaborative governance* berikhtiar untuk melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kolaborasi diinisiasi atas dasar keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak. Dengan demikian, kolaborasi dapat menyatukan dan melengkapi berbagai

komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama (Mutiarawati dan Sudarmo, 2017: 194).

Pengelolaan objek wisata berbasis *collaborative governance* ini sudah mulai diterapkan di beberapa destinasi wisata seperti objek wisata Candi Sambisari dan wisata religi Sunan Giri. Dalam pengelolaan objek wisata Candi Sambisar, pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat telah mengeluarkan sejumlah paket wisata untuk mendukung perkembangan kegiatan pariwisata Candi Sambisari itu sendiri. Kegiatan tersebut meliputi promosi, destinasi wisata, fasilitas utama maupun fasilitas penunjang, produk wisata dan sumber daya manusia. Berkat adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, saat ini sudah terdapat berbagai objek wisata yang dalam proses promosi tentunya memiliki potensi dan daya tarik masing-masing (Sabatina, 2018: 192).

Sementara itu, dalam pengelolaan objek wisata religi Sunan Giri, masyarakat dan pemerintah mengedepankan sikap saling percaya (*mutual trust*). Sikap saling percaya merupakan syarat untuk membangun kolaborasi yang solid antara pemerintah dengan masyarakat. Sikap saling percaya membuktikan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat bisa diandalkan sehingga dapat saling menguntungkan (Leman, 2018: 11). Pengelolaan wisata religi Sunan Giri yang berbasis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membuat objek wisata tersebut semakin berkembang. Kini, semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Arikunto, 2019: 136). Sehingga metode penelitian diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna bersifat keilmuan atau memenuhi syarat (kaidah) ilmu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikuntoro (2002: 247) metode penelitian deskriptif eksploratif adalah sebuah riset yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau objek yang ada. Deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Moelong (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala, fakta, dan penyakit tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena (Akbar, dkk. 2018: 16).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 6 22). Menurut Supranto (2000: 1) objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Tujuan objek penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal. Dayan (1986: 21) mengemukakan bahwa objek penelitian adalah pokok persoalan yang akan diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*) (Sugiyono, 2015: 229).

Penelitian ini berfokus pada kolaborasi pemerintah kalurahan dalam pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglingsgo. *Pertama*, tempat (*place*). Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, pelaku (*actor*). Aktor yang terlibat dalam penelitian ini adalah pemerintah dan

masyarakat Kalurahan Pagerharjo baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan objek wisata Kebun Teh Nglinggo.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu yaitu mampu memberikan data atau informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Lurah Kalurahan Pagerharjo;
- b. Pamong Kalurahan Pagerharjo;
- c. Pokdarwis;
- d. Ketua Pengurus Desa Wisata
- e. Pengurus BUMKal;
- f. BPKal Pagerharjo; dan
- g. Masyarakat.

Tabel I.I Deskripsi Subjek Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Keterangan
1	Sri	Perempuan	35	Masyarakat
2	Susanto	Laki-Laki	40	Masyarakat
3	Sri Saminah	Perempuan	60	Masyarakat
4	Widayat	Laki-Laki	55	Lurah
5	Herry Yudiati	Perempuan	46	Panata Laksana dan Pangripta
6	Setiyogo	Laki-Laki	29	Carik
7	Agustinus Sulisty	Laki-Laki	39	Ketua Pokdarwis
8	Antonius Nugroho	Laki-Laki	54	Ketua Pengurus Desa Wisata
9	Sri Handayani	Perempuan	46	Direktur BUMKal
10	Haryati	Perempuan	40	Anggota BPKal

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena tempat ini memiliki potensi wisata. Namun, pengelolaan potensi wisata tersebut belum mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan kalurahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan (Djaman Satori dan Aan Komariah; 2011: 103). Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Sehingga data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, menurut Arikunto (2006: 221), antara lain dilakukan dengan:

a. Observasi

Menurut Zainal Arifin (2010) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Sedangkan menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2018: 174), observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan kemudian

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera.

Rahasia keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri sebab pengamat melihat, mendengar, mencium atau mendengarkan suatu obyek penelitian kemudian ia yang menyimpulkan dari apa yang diamati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian (Yusuf, 2014) karena kualitas penelitian ditentukan oleh seberapa jauh dan mendalam peneliti mengerti tentang situasi dan konteks dan mendeskripsikannya sealamiah mungkin (Semiawan, 2010). Penerapan di lapangan adalah melakukan kunjungan ke lokasi penelitian dan mencari data awal yang kemudian menjadi landasan dalam pembuatan proposal.

Penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Dengan demikian, peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan (Bungin, 2007: 115-117).

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang

diwawancarai (*interviewee*), melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2010). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan itu dengan pihak yang menjawab pertanyaan/responden (Moleong, 2018: 186). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan subjek penelitian (informan). Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, opini, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Dokumentasi

Selain melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara, informasi atau data juga dapat diperoleh lewat dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental (Sugiyono, 2007: 240). Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Data berupa dokumen meliputi surat, catatan harian, arsip, foto, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak hanya sekedar barang yang tidak bermakna.

Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh dari informan yaitu hasil wawancara dengan informan. Hasil wawancara ini ditulis dan direkam guna untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Sedangkan data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu berupa dokumen profil lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2013), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Dengan demikian, data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian ini melakukan penelusuran, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang dengan jangkauan konseptual yang lebih luas. Dalam melakukan eksplorasi, konsep yang matang menjadi goal dalam penelitian dan jangkauan konsep yang lebih luas (Yusuf, 2017).

Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari informan melalui hasil observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu penumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri atas deskripsi dan refleksi. Deskripsi berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada pernyataan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai hasil pengamatan dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir.

Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data-data terkumpul sudah mengantisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak sewaktu memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan penemuan metode pengumpulan data.

Selama pengumpulan data berlangsung, sudah terjadi tahapan reduksi, selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan lain-lain.) Kegiatan ini terus berlangsung sampai pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan pada akhir pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap dan sistematis.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992: 16-20).

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Hal ini mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dimengerti.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan sesuai dengan data-data yang diperoleh dalam penelitian dan telah dianalisis. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban dari rumusan pernyataan penelitian yang dicari selama proses penelitian.

Pada penelitian dengan pendekatan kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lokasi penelitian dan selama proses

pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahap ini penarikan kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Setiap kesimpulan data senantiasa akan terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Secara singkat makna muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya dan validitasnya (Emzir, 2016:133).

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkann untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti persistent obsevation (observasi berlanjut), trianggulasi, maupun peerderieting (pemeriksaan sejawat melalui diskusi) (Moleong, 2012: 330). Pengecakan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu sendiri.

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dari sebuah instrumen. Sebab instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010: 211). Jadi, keabsahan data merupakan cara untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh melalui bermacam-macam teknik pengumpulan data untuk menunjukkan tingkat kevalidan dari sebuah instrument. Ada beberapa cara untuk menguji validitas data dalam penelitian kualitatif, di antaranya:

- a. Membandingkan hasil wawancara, hasil pengamatan, dan dokumen yang telah diperoleh;
- b. Membandingkan pengakuan seorang informan secara pribadi dengan pernyataan-pernyataan di depan umum, atau pada saat dilangsungkan atau pada saat diskusi kelompok;
- c. Membandingkan pendapat antara yang satu dengan yang lain pada saat dilakukan penelitian (sinkronis) dengan situasi yang pernah terjadi sepanjang sejarah (diakronis); dan
- d. Membandingkan pendapat dari berbagai macam, seperti antara orang biasa, berpendidikan dan birokrat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN PAGERHARJO DAN OBJEK WISATA KEBUN TEH NGLINGGO

A. Profil Kalurahan Pagerharjo

1. Sejarah Kalurahan Pagerharjo

Setiap kalurahan atau wilayah memiliki sejarah dan latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini merupakan cerminan dari karakter dan ciri khas tertentu suatu daerah. Sejarah kalurahan selalu menjadi cerita turun-temurun dari penduduk setempat maupun di luar wilayah. Sejarah menjadi hal yang penting yang harus dijaga kelestarian dan kebenarannya. Jika tidak dirawat akan kehilangan informasi data dan fakta yang sebenarnya karena masing-masing penduduk dapat menyampaikan cerita sendiri-sendiri berdasarkan pandangan masing-masing. Dokumen sejarah harus diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya.

Pagerharjo merupakan sebuah kalurahan yang berada di wilayah Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Pagerharjo terbentuk berdasarkan kebijaksanaan Sultan Hamengku Buwono IX, untuk melaksanakan pembangunan desa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Mulai bulan Juni 1946 setiap Pemerintah Desa diperintahkan untuk melaksanakan penggabungan desa-desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kalurahan Pagerharjo merupakan penggabungan dari 3 kalurahan, yaitu: Kalurahan Plono, Kalurahan Gegerbajing, dan Kalurahan Kalirejo. Pada waktu itu, Kalurahan Plono dipimpin oleh Slamet Kariyo Sentono, Kalurahan Gegerbajing dipimpin oleh Dermo Semito, dan Kalurahan Kalirejo dipimpin oleh R. Udoikromo yang memimpin kalurahan sampai tahun 1948. Berdasarkan hal tersebut, lahirlah gagasan bersama dari ketiga kalurahan tersebut baik dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya untuk menggabungkan ketiga kalurahan tersebut menjadi satu nama dan satu kepemimpinan.

Gagasan tersebut disepakati dengan nama Kalurahan Pagerharjo. Nama Pagerharjo diambil dari salah satu suku kata dari ketiga nama kalurahan tersebut. PA berasal dari suku kata “Plana”, GER berasal dari suku kata “Gegerbajing”, dan JO dari salah satu suku kata “Kalirejo”. Agar nama lebih enak dalam pengucapannya dan mempunyai makna dan harapan maka disisipi suku kata “Har” menjadi “Harjo” yang berarti kalurahan yang makmur dengan dipimpin oleh seorang Lurah yaitu Slamet Kariyo Sentono. Secara resmi, hari jadi Kalurahan Pagerharjo jatuh pada hari Sabtu Pahing, 25 Djanoeari 1947/24 Sapar Dje 1878 (kalender Jawa). Pembentukan Kalurahan Pagerharjo ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Pagerharjo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Hari Jadi Kalurahan Pagerharjo. Kalurahan Pagerharjo terdiri dari 20 padukuhan yang berasal dari penggabungan bekas 3 Kalurahan. Adapun 20 padukuhan tersebut meliputi: Padukuhan Separang, Padukuhan Sarigono, Padukuhan

Ngemplak, Padukuhan Plana Barat, Padukuhan Plana Timur, Padukuhan Nglinggo Barat, Padukuhan Nglinggo Timur, Padukuhan Jobolawang, Padukuhan Ngaglik, Padukuhan Gegerbajing, Padukuhan Kemesu, Padukuhan Ngentak, Padukuhan Sinogo, Padukuhan Kalirejo Utara, Padukuhan Kalirejo Selatan, Padukuhan Jetis, Padukuhan Kalinongko, Padukuhan Beteng, Padukuhan Suren, dan Padukuhan Mendolo.

2. Keadaan Geografis

Secara geografis, wilayah Kalurahan Pagerharjo terletak paling ujung sebelah utara Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Kalurahan Pagerharjo di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Paripurna, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pucungroto, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Sedangkan di sebelah Timur berbatasan Kalurahan Ngargosari dan Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keadaan ini menunjukkan bahwa letak Kalurahan Pagerharjo boleh dibilang sangat strategis karena berada di antara keempat kalurahan lain. Dengan kenyataan ini, maka Kalurahan Pagerharjo dapat melakukan kerjasama antarkalurahan untuk mengembangkan pembangunan kawasan

kalurahan. Misalnya, membangun Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) bersama kalurahan-kalurahan tetangga.

Luas wilayah Kalurahan Pagerharjo secara keseluruhan adalah 1069,5115 Ha yang merupakan tanah hak milik dan hak pakai bagi warga kalurahan tersebut. Lahan Kalurahan Pagerharjo terdiri dari dua jenis, yaitu lahan datar yang dengan luas 32,085 Ha dan lahan miring dengan luas 1.037,426 Ha. Adapun tanah tersebut difungsikan untuk berbagai kepentingan masyarakat maupun kepentingan umum lainnya. Pembagian penggunaan tanah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.1 Luas Wilayah

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	351,2335	32,84
2	Persawahan	108,45	10,14
3	Perkebunan	123,7200	11,56
4	Makam/kuburan	3,2060	0,29
5	Perkantoran	0,5000	0,04
6	Prasarana umum lainnya	482,0000	45,06
Total		1.069,5115	100

Sumber: Profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa selain dijadikan sebagai arena pemukiman, perkantoran, dan prasarana umum lainnya, lahan Kalurahan Pagerharjo digunakan untuk mengembangkan sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian ini ditunjukkan dengan adanya sebagian lahan yang digunakan untuk areal persawahan dan perkebunan. Dengan begitu, pertanian merupakan potensi utama yang dapat dikembangkan di Kalurahan Pagerharjo. Apalagi jika dilihat dari topografinya, Kalurahan Pagerharjo berada di ketinggian 600-700 m di atas permukaan laut.

Sementara itu, suhu di Kalurahan Pagerharjo berada di antara 18-30°C dengan curah hujan 2.500/3.000 mm/th. Kondisi ini sangat mendukung untuk mengembangkan persawahan. Dengan keadaan seperti ini, maka para petani mesti diletakkan sebagai subjek pembangunan di Kalurahan Pagerharjo. Dalam rangka menjadikan petani sebagai subjek pembangunan, maka para petani mesti dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan khususnya pembangunan pertanian. Singkatnya, pemberdayaan petani mesti menjadi basis utama kebijakan Pemerintah Kalurahan Pagerharjo. Dengan begitu, potensi pertanian di Kalurahan Pagerharjo dapat dikembangkan dengan maksimal.

3. Keadaan Demografi

Penduduk merupakan potensi yang sangat menentukan maju mundurnya perkembangan suatu wilayah. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Dalam hal ini, penduduk merupakan aktor perencana dan pelaksana pembangunan. Oleh karena itu, penduduk merupakan unsur yang harus mendapatkan perhatian baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

a. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada tahun 2021, penduduk Kalurahan Pagerharjo berjumlah 5.043 jiwa. Adapun kategori penduduk berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	2.556	50,68
2	Perempuan	2.487	49,31
Total		5.043	100

Sumber: Profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kalurahan Pagharjo hampir berimbang. Meskipun demikian, kita masih mendapat gambaran bahwa kuantitas laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dengan komposisi 50,68% berbanding 49,31%. Dengan demikian, penduduk Kalurahan Pagerharjo didominasi oleh penduduk laki-laki.

Dominasi laki-laki atas perempuan tampaknya bukan hanya berkaitan dengan kuantitas penduduk, tetapi juga berkaitan dengan kualitas penduduk. Artinya, dominasi laki-laki atas perempuan juga terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena dalam banyak hal, perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Misalnya, perempuan seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, mengembangkan keterampilan, maupun memperoleh kesempatan kerja. Dengan begitu, perempuan seringkali hanya beroperasi pada ranah privat dan jarang tampil dalam ruang publik seperti menjadi Lurah.

Semua keterbatasan yang ada pada perempuan sebetulnya berangkat dari akar persoalan yang sama yaitu budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain

itu, masyarakat kita sudah terbiasa melakukan perbedaan gender. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara itu, laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Karena konstruksi sosial inilah, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif. Kaum laki-laki harus terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menuju sifat gender yang ditentukan oleh masyarakat, yaitu secara fisik lebih kuat dan besar. Sementara itu, urusan mendidik anak, mengelola atau merawat kebersihan dan keindahan rumah dianggap sebagai “kodrat” perempuan (Fakih, 2008: 12). Dengan kalimat lain, kaum perempuan hanya beroperasi di ranah privat, yaitu rumah tangga.

b. Penduduk Berdasarkan Usia

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penduduk Kalurahan Pagerharjo berdasarkan usia.

Tabel II.3 Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Balita	348	6,90
2	Anak-anak	730	14,47
3	Remaja	795	15,76
4	Usia produktif	1.673	33,17
5	Usia non produktif	907	17,98
6	Usia lanjut	590	11,69
Total		5.043	100

Sumber: Profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kalurahan Pagerharjo mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat memadai untuk menopang pembangunan kalurahan. Penduduk usia produktif Kalurahan Pagerharjo berjumlah 1.673 jiwa. Rinciannya adalah penduduk perempuan yang berada pada usia produktif berjumlah 808 jiwa. Sementara itu, penduduk laki-laki yang berada pada usia produktif berjumlah 815 jiwa.

Dengan formasi seperti ini, maka cita-cita untuk menjadikan Kalurahan Pagerharjo sebagai entitas yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo perlu mengembangkan pola pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pola pembangunan yang menekankan keterlibatan semua elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap evaluasi kegiatan. Singkatnya, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

c. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penduduk Kalurahan Pagerharjo berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel II.4 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Usia 3-6 th. yang belum masuk TK	710	14,07
2	Usia 3-6 th. yang sedang TK/PAUD		
3	Usia 7-18 th. Tidak pernah sekolah	341	6,88
4	Usia 7-18 th. Sedang sekolah		
5	Usia 18-56 th. Tidak pernah sekolah		
6	Usia 18-56 th. Tidak tamat SD		
7	Tamat Sd/ sederajat	1.571	31,15
8	Tamat SMP/ sederajat	912	18,08
9	Tamat SMA/ sederajat	1.300	25,77
10	Tamat D1/ sederajat	20	0,39
11	Tamat D2/ sederajat	43	0,85
12	Tamat D3/ sederajat	137	2,71
13	Tamat S1/ sederajat		
14	Tamat S2/ sederajat	3	0,05
Total		5.037	100

Sumber: Profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2021.

Data di atas menunjukkan bahwa sebetulnya, secara kuantitas, sumber daya manusia di Kalurahan Pagerharjo cukup memadai untuk menyokong pembangunan. Namun, kuantitas ini tidak dibarengi oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Pagerharjo masih sangat rendah.

Dengan kenyataan ini, maka program pembangunan di Kalurahan Pagerharjo mesti diarahkan untuk pembangunan sosial (pembangunan non-fisik). Pembangunan sosial ini bisa diaplikasikan melalui skema pemberdayaan masyarakat misalnya menelurkan program-program pendidikan baik formal, informal, maupun non-formal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas masyarakat sehingga dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan di Kalurahan Pagerharjo.

d. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Berikut adalah tabel yang menunjukkan penduduk Kalurahan Pagerharjo berdasarkan mata pencaharian.

Tabel II.5 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	4.488	89,95
2	PNS	38	0,76
3	Pedagang	25	0,50
4	Perawat swasta	4	0,08
5	TNI	3	0,06
6	POLRI	12	0,24
7	Pengusaha kecil dan menengah	54	1,08
8	Dukun kampung terlatih	3	0,06
9	Jasa pengobatan alternatif	2	0,04
10	Dosen swasta	1	0,02
11	Pengusaha besar	5	0,10
12	Seniman	1	0,02
13	Kary. Perusahaan swasta	293	5,87
14	Kary. Perusahaan pemerintah	113	2,26
15	TKI	1	0,01
Total		4.989	100

Sumber: Profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2021.

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Kalurahan Pagerharjo sangat bervariasi. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Pagerharjo bermata pencaharian petani. Hal ini berarti Kalurahan Pagerharjo masih bertumpu pada sektor pertanian. Dengan pemahaman ini, maka kita dapat mengetahui bahwa Kalurahan Pagerharjo didominasi oleh lahan pertanian. Oleh karena itu, reforma agraria merupakan kebijakan yang mesti dilakukan di Kalurahan Pagerharjo.

Reforma agraria merupakan upaya untuk memberdayakan buruh tani. Pemberdayaan petani dapat dilakukan dengan cara redistribusi akses dan redistribusi aset kepada para petani. Redistribusi akses berkaitan dengan distribusi tanah kepada individu, kelompok, atau badan usaha tertentu. Dengan kalimat lain, redistribusi akses berkaitan dengan kesempatan para petani untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan tanah baik perorangan maupun kelompok. Sementara itu, untuk menunjang redistribusi akses, maka perlu juga dilakukan redistribusi aset. Redistribusi aset berkaitan dengan fasilitas dan program yang diarahkan untuk menunjang petani dalam mengelola lahan pertanian. Misalnya, memfasilitasi petani agar menemukan pasar yang jelas dalam memasarkan komoditi dan hasil produksinya.

e. Penduduk Berdasarkan Agama

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penduduk Kalurahan Pagerharjo berdasarkan agama.

Tabel II.6 Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	4.312	85,50
2	Kristen Protestan	162	3,21
3	Kristen Katolik	564	11,18
4	Kepercayaan terhadap Tuhan	5	0,09
Total		5.43	100

Sumber: Profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2021.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kalurahan Pagerharjo masih memegang teguh ajaran agama atau kepercayaan kepada Tuhan. Di antara masyarakat Kalurahan Pagerharjo, ada yang mempercayai agama sebagai jalan untuk menemukan Tuhan. Masyarakat yang memilih jalan ini menganut tiga dari enam agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Di antara masyarakat ini, mayoritas memeluk agama Islam sebagai jalan untuk menemukan Tuhan. Sebagian masyarakat memeluk agama Katolik dan Protestan sebagai jalan untuk menemukan Tuhan. Di lain pihak, ada masyarakat yang tidak harus memeluk agama tertentu untuk menemukan Tuhan. Masyarakat ini percaya bahwa agama bukan satu-satunya jalan untuk mempercayai keberadaan Tuhan. Dewasa ini, masyarakat jenis ini disebut sebagai

penganut Agnostik. Penganut Agnostik percaya pada Tuhan, tapi tidak percaya pada agama.

Meskipun masyarakat menganut kepercayaan yang berbeda, namun mereka menjalani kehidupan bertetangga yang nyaman dan aman. Mereka tetap menjaga kerukunan dalam bertetangga dan beragama. Mereka dapat saling hidup berdampingan, rukun, dan menjunjung tinggi toleransi satu sama lain. Masyarakat memiliki rasa toleransi yang tinggi. Mereka percaya bahwa dengan rasa toleransi yang tinggi akan tercipta suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat.

4. Kondisi Sarana dan Prasana

a) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan sarana dan prasana pendidikan di Kalurahan Pagerharjo.

Tabel II. 7 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Gedung SMA/Sederajat	1
2	Gedung SMP/Sederajat	1
3	Gedung SD/Sederajat	5
4	Gedung TK	5
5	Gedung PAUD	7
6	Lembaga Pendidikan Agama	3
7	Perpustakaan Kalurahan	1
Total		23

Sumber: Profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Kalurahan Pagerharjo belum memadai untuk menyokong pengembangan dan peningkatan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat. Sarana dan prasarana pendidikan di Kalurahan Pagerharjo belum mampu mengcover luasnya wilayah kalurahan. Hal ini memberi makna bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan karena jarak tempuh ke sarana dan prasarana pendidikan terlampau jauh. Jarak tempuh yang jauh ini tentu saja memakan waktu, tenaga, dan biaya untuk mengakses pendidikan. Jika tingkat pendidikan masyarakat rendah, sebaiknya dijelaskan melalui logika ini. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo mesti mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada kemudahan akses pendidikan masyarakat.

b) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan sarana dan prasarana kesehatan di Kalurahan Pagerharjo.

Tabel II.8 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Puskemas	1
2	Pustu	1
3	Posyandu	20
4	Rumah Praktik Dokter	1
5	Rawat Inap	1
6	Laboratorium Kesehatan	1
Total		25

Sumber: Profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di Kalurahan Pagerharjo belum cukup memadai untuk menjamin kesehatan masyarakat. Kalurahan Pagerharjo belum memiliki poskesdes. Dengan begitu, keluhan masyarakat mengenai kesehatan belum bisa terpenuhi. Sebab poskesdes berfungsi berfungsi untuk melayani keluhan masyarakat mengenai kesehatan sebelum penanganan lebih lanjut ke puskesmas atau rumah sakit.

Tabel II.9 Sarana Kesehatan

No	Sarana	Jumlah (Personil)
1	Dokter Umum	1
2	Dokter Gigi	1
3	Dokter Spesialis	1
4	Paramedis	7
5	Dukun Bersalin Terlatih	4
6	Bidan	2
7	Perawat	5
8	Dokter Praktik	2
9	Dukun Pengobatan Alternatif	2
Total		23

Sumber: Profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana kesehatan masih terbilang belum cukup memadai untuk menyokong kesehatan masyarakat. Jumlah personil kesehatan belum mampu mengimbangi populasi penduduk serta kompleksitas masalah kesehatan masyarakat. Padahal, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan sebagainya merupakan aktor yang penting penting dalam memastikan kesehatan masyarakat. Mereka memiliki tugas untuk menangani masyarakat yang mengalami saki, baik melalui perawatan (rawat jalan maupun inap), himbauan, serta edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.

c) Sarana dan Prasarana Olahraga

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan sarana dan prasarana olahraga di Kalurahan Pagerharjo.

Tabel II.10 Sarana dan Prasarana Olahraga

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Lapangan sepak bola	1
2	Lapangan bulu tangkis	1
3	Lapangan bola voly	4
4	Meja Pingpong	1
Total		7

Sumber: Profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana olahraga di Kalurahan Pagerharjo belum memadai untuk menyokong pengembangan bakat dan minat masyarakat dalam bidang olahraga. Meskipun sarana dan prasarana olahraga di atas terbuka untuk umum, namun tetap saja itu mampu mengimbangi bakat dan minat masyarakat Kalurahan Pagerharjo yang tersebar di 20 padukuhan. Dengan kondisi ini, maka Pemerintah Kalurahan mesti menelurkan kebijakan yang bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan bakat dan minat masyarakat dalam bidang olahraga.

d) Sarana dan Prasarana Ibadah

Berikut adalah tabel yang menunjukkan sarana dan prasarana ibadah di Kalurahan Pagerharjo.

Tabel II.11 Sarana dan Prasarana Ibadah

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Masjid	28
2	Mushola	13
3	Gereja Katolik	1
4	Gereja Kristen Jawa	1
Total		43

Sumber: Profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana ibadah di Kalurahan Pagerharjo terbilang cukup memadai untuk menyokong masyarakat menjalankan ritual keagamaan. Sarana dan prasarana ibadah yang terdapat di Kalurahan Pagerharjo sudah cukup memadai untuk mengakomodasi kepentingan ibadah masyarakat yang memeluk agama Islam, Katolik, dan Protestan. Meskipun demikian, Pemerintah Kalurahan Pagerharjo mesti melakukan pendekatan yang khusus kepada masyarakat yang menganut paham Agnostik sehingga dapat mengetahui kebutuhan mereka. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat Agnostik merasakan kehadiran pemerintah kalurahan dalam kehidupan mereka. Kalaupun mereka tidak membutuhkan sarana dan prasarana ibadah, boleh jadi mereka membutuhkan sarana dan prasarana lain yang dapat digunakan untuk merawat kepercayaan mereka.

5. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Pagerharjo

Pemerintah Kalurahan Pagerharjo terdiri dari Lurah, Carik, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa, Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, serta Dukuh. Berikut adalah tabel yang menunjukkan struktur Pemerintah Kalurahan Pagerharjo.

Tabel II.12 Struktur Pemerintah Kalurahan Umbulahrjo

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
1	Widayat	Laki-laki	Lurah	S1
2	Setiyoko	Laki-Laki	Carik	S1
3	Bambang Untoro	Laki-Laki	Jagabaya	S1
4	Wackid Cahyono	Laki-Laki	Ulu-Ulu	S1
5	Supanto	Laki-Laki	Kamituwa	SLTA
6	Heri Yuliati	Perempuan	Panata Laksana Sarta Pangripta	D3
7	Katri Maharsiwi	Perempuan	Danarta	S1

Sumber: Profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2021.

Lurah berkedudukan sebagai kepala pemerintah kalurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Saat ini, Kalurahan Pagerharjo dipimpin oleh Widayat. Sebagai Lurah, Widayat bertugas menyelenggarakan pemerintahan kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan.

a. Tugas dan Fungsi Lurah

Tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan kalurahan yang diemban oleh Widayat mencakup; tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kententeraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta

pengelolaan wilayah. Tugas untuk melaksanakan pembangunan yang diemban oleh Widayat meliputi: pembangunan sarana prasarana kalurahan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Tugas untuk pembinaan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan tugas untuk pemberdayaan masyarakat meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, Karang Taruna. Selain itu, sebagai kepala pemerintahan di Kalurahan Pagerharjo, Widayat juga bertugas untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Tugas dan Fungsi Carik

Carik adalah sebutan untuk Sekretaris di Kalurahan Pagerharjo. Carik berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan Pagerharjo. Saat ini, Carik Kalurahan Pagerharjo dijabat oleh Setiyoko. Sebagai Carik, Setiyoko bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan.

Tugas Carik adalah sebagai berikut: *Pertama*, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi. *Kedua*, melaksanakan urusan umum seperti

penataan administrasi perangkat kalurahan, penyediaan prasarana perangkat kalurahan dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. *Ketiga*, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya. *Keempat*, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan (APBKal), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Tugas dan Fungsi Jagabaya

Jagabaya berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pemerintahan dan keamanan. Saat ini, Jagabaya Kalurahan Pagerharjo dijabat oleh Bambang Utoro. Sebagai Jagabaya, Bambang Utoro bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan dan keamanan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan.

d. Tugas dan Fungsi Ulu-Ulu

Ulu-Ulu berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pembangunan dan kemakmuran. Saat ini, Ulu-Ulu Kalurahan Pagerharjo dijabat oleh Wackid Cahyono. Sebagai Ulu-Ulu,

Wackid Cahyono bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pembangunan dan kemakmuran serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang tata ruang.

e. Tugas dan Fungsi Kamituwa

Kamituwa berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang kemasyarakatan. Saat ini, Kamituwa Kalurahan Pagerharjo dijabat oleh Supanto. Sebagai Kamituwa, Supanto bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang sosial kemasyarakatan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan.

f. Tugas dan Fungsi Danarta

Danarta berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, Danarta Kalurahan Pagerharjo dijabat oleh Karti Maharsiwi. Sebagai Danarta, Karti Maharsiwi bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan keuangan dan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

g. Tugas dan Fungsi Panata Laksana Sarta Pangripta

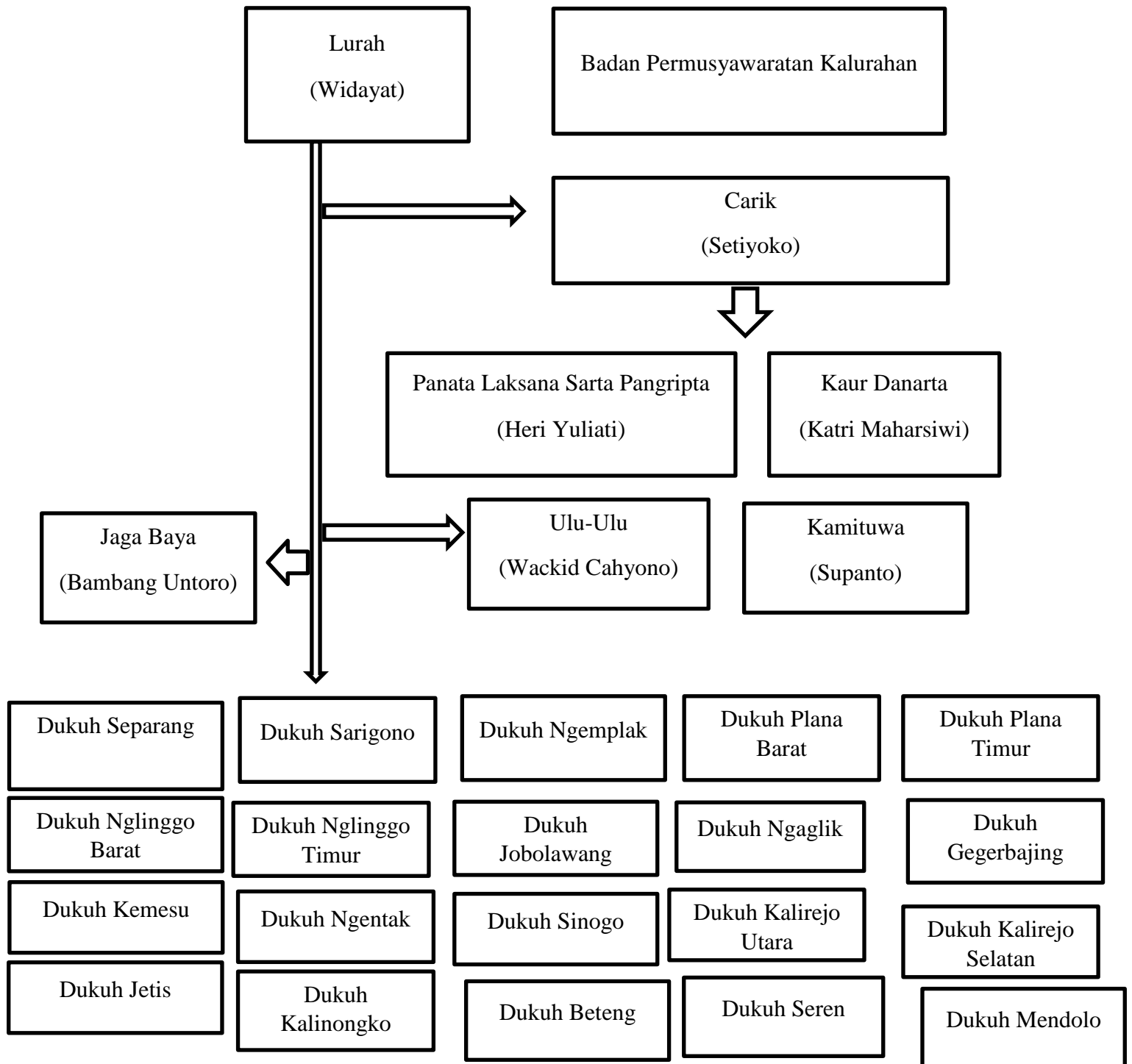
Panata Laksana Sarta Pangripta Kalurahan Pagerharjo diemban Heri Yuliati. Sebagai Panata Laksana Sarta Pangripta, Heri Yuliati mempunyai beberapa fungsi yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi Pamong Kalurahan, penyediaan Pamong

Kalurahan, dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Singkatnya, Panata Laksana Sarta Pangripta bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

h. Tugas dan Fungsi Dukuh

Setiap padukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh. Dukuh berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Dukuh memiliki fungsi sebagai berikut: *Pertama*, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. *Kedua*, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. *Ketiga*, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. *Keempat*, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagan II.1 Struktur Pemerintahan Kalurahan Pagerharjo



Sumber: Profil Kalurahan Pageharjo Tahun 2021

6. Kondisi Badan Permusyawaratan Kalurahan Pagerharjo

Dalam menjalankan tugas, Lurah bersama Pamong Kalurahan akan selalu berdinamika dan “berhadapan” dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). BPKal merupakan lembaga yang melakukan akuntabilitas horizontal. BPKal merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPKal merupakan institusi demokrasi perwakilan kalurahan. Tetapi, ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR.

Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPKal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, BPKal merupakan unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan bersama pemerintah kalurahan. Itu berarti bahwa BPKal ikut mengatur dan mengambil keputusan kalurahan. Itu juga berarti bahwa fungsi hukum (legislasi) BPKal relatif kuat.

Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengeluarkan (eksklusi) BPKal dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPKal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPKal berkedudukan sebagai lembaga kalurahan yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh mengatur dan mengurus kalurahan. BPKal juga menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat kalurahan; melakukan pengawasan kinerja Lurah serta menyelenggarakan musyawarah kalurahan. Ini berarti

bahwa eksklusi BPKal dan pelemahan fungsi hukum BPKal digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol, dan deliberasi).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa BPKal mempunyai dua fungsi yaitu fungsi hukum dan fungsi politik. Fungsi hukum yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah. Sedangkan fungsi politik BPKal terdiri dari: *Pertama*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Kedua*, melakukan pengawasan kinerja Lurah. *Ketiga*, menyelenggarakan musyawarah kalurahan.

Tabel II.13 Struktur BPKal Pagerharjo Periode 2021-2026

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Joko Wulantoro	Laki-Laki	Ketua
2	Harmiyantoro	Laki-Laki	Wakil Ketua
3	Heribertus Tri Sarmuji	Laki-Laki	Sekretaris
4	Haryati	Perempuan	Bendahara
5	Ananias Yuniarto	Laki-Laki	Ketua Sie Bidang Pembangunan
6	Parjio	Laki-Laki	Sie Bidang Pembangunan
7	Santosa	Laki-Laki	Sie Bidang Pembangunan
8	Wahyu Dwi Atmoko	Laki-Laki	Ketua Sie Bidang Pemerintahan
9	Maryatun	Perempuan	Sie Bidang Pemerintahan

Sumber: Profil Kalurahan Pagerharjo Tahun 2021.

B. Profil Kebun Teh Nglinggo

1. Sejarah Kebun Teh Nglinggo

Berdasarkan *history* yang telah dan terus diceritakan secara turun-temurun, keberadaan Padukuhan Nglinggo tidak terlepas dari peristiwa sejarah Pangeran Diponegoro, dimana pada zaman itu, ada tiga orang pengikut setia Pangeran Diponegoro yang bernama Ki Linggo Manik, Ki Dalem Tahu, dan Gagak Roban mendapat wilayah Menoreh, yang saat ini meliputi Kulon Progo, Magelang, dan Purworejo sebagai wilayah konsentrasi berdirinya melawan kompeni Belanda. Sebagai pusat perjuangan dipilih lokasi yang berada di wilayah puncak pegunungan Menoreh sebagai tempat yang strategis untuk menyusun pergerakan kompeni Belanda. Tempat ini yang kemudian disebut dengan nama Nglinggo. Nama Nglinggo diambil dari nama pemimpin gerakan yaitu Ki Linggo Malik.

Untuk menemukan fakta bahwa cerita ini merupakan sejarah yang nyata, dapat dilihat dari adanya tiga petilasan yang banyak ditumbuhi pepohonan besar berumur ratusan tahun. Sampai saat ini, tempat tersebut masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat dan menjadi objek wisata spiritual.

Pada awalnya, pengembangan Kebun Teh Nglinggo hanya perkebunan teh biasa yang hanya diambil hasil panen daun tehnya saja yang dikelola dengan berbasis pada swadaya masyarakat melalui kerja bakti dan gotong royong. Melalui swadaya, masyarakat berhasil membangun berbagai

fasilitas seperti gapura, gazebo, gardu pandang, dan area parkir. Sejak tahun 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pariwisata mulai terlibat dalam pengembangan Kebun Teh Nglinggo. Pada waktu itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo memberikan izin agar area seluas 4 hektar dibuka sebagai area wisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo kemudian memberikan mandat kepada Pokdarwis untuk mengelola Kebun Teh Nglinggo. Untuk mendukung daya tarik wisatawan, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo menggelar kesenian tradisional Lengger Topeng, Tayup Topeng, dan Jatilan (Nurningsih, dkk. 2018: 336).

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo melakukan pembinaan terhadap aktor pengelola objek wisata Kebun Teh Nglinggo agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar serta mengurangi pengangguran. Dinas Pariwisata Kulon Progo secara intensif melakukan peningkatan SDM pengelola, mulai dari pelatihan kuliner, pemandu wisata, pelayanan prima, hingga pengelolaan *homestay* dan melakukan pendampingan dalam menyusun paket wisatawan manajemen, promosi di media sosial, dan membantu promosi dalam berbagai kegiatan.

Sampai saat ini, objek wisata Kebun Teh Nglinggo di Kalurahan Pagerharjo masih berada di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pariwisata. Objek wisata Kebun Teh Nglinggo memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Kulon Progo. Hal ini terjadi karena biaya retribusi objek wisata Kebun Teh Nglingsgo tersebut hanya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Objek wisata Kebun Teh Nglingsgo yang didukung oleh panorama yang indah, sejuk, serta adat-adat dan budaya yang menarik, maka pada tahun 2004 desa ini ditetapkan sebagai Desa Wisata Nglingsgo. Pada tahun 2009 juga mendapat gelar sebagai Desa Wisata terunik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kondisi Objek Wisata Kebun Teh Nglingsgo

Kebun Teh Nglingsgo merupakan perkebunan teh yang telah dibuka sejak tahun 1990. Perkebunan teh ini terletak di perbukitan Menoreh yaitu di Padukuhan Nglingsgo Timur, Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah kebun teh Samigaluh ini mayoritas 98% dimiliki oleh masyarakat setempat sedangkan 2% sisanya dimiliki oleh PT. Pagilaran. Meski kebun teh ini sudah ada sejak tahun 1990, akan tetapi baru terkenal sebagai objek wisata sekitar tahun 2015 dimana pengunjungnya rata-rata terdiri dari kaum muda. Untuk pengelolaannya, masyarakat setempat kemudian membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pagerharjo.

Selain perkebunan teh, di sekitar lokasi ini juga terdapat hutan pinus dan perkebunan warga. Wisata di sini masih sangat alami. Adapun satwa liar yang ada antara lain babi hutan dan beberapa jenis burung kecil.

Menurut salah satu warga setempat, dulu saat pembukaan lahan pertama kali yaitu sekitar tahun 1990-an pernah ditemukan dua ekor harimau jawa yang mati akibat keracunan obat yang digunakan warga untuk melindungi tanaman dari serangan hama. Namun, semenjak kejadian ini, obat-obatan yang sekiranya beracun untuk satwa liar tidak digunakan lagi.

Selain kebun teh, pesona lain yang ditawarkan oleh Desa Wisata Nglinggo adalah air terjun yang berada diketinggian 900 mdpl yang disebut dengan nama Curug Watu Jonggol. Adapun keistimewaan lain yang disuguhkan oleh kebun teh Nglinggo yaitu terdapatnya spot gardu pandang yang biasa digunakan untuk menikmati panorama perbukitan yaitu bukit Ngisis. Para wisatawan juga bisa menikmati wisata *off-road*. Apabila ingin bermalam untuk menikmati *sunrise* pada pagi hari, di sekitar Kebun Teh Nglinggo sudah menyediakan *homestay* yang lengkap dengan kamar mandi, tempat tidur, dan toilet yang bersih serta masyarakat pemilik usaha *homestay* akan mempersiapkan makanan tradisional daerah Samigaluh. Jika ingin menikmati makanan ringan, di sekitar Kebun Teh Nglinggo, masyarakat sudah membuka stan yang menyediakan makanan dan minuman ringan.

Selain itu, di lokasi ini juga bisa dilakukan kegiatan petualangan dan perkemahan. Kebun teh ini memang tidak seluas wisata Kebun Teh Tambi dan kebun-kebun teh lainnya. Akan tetapi, tempat ini memiliki keunggulan lain, yaitu *view* alam yang begitu mempesona. Adanya Kedeng Gunung Kukusan dan gugusan bukit Menoreh semakin

mempercantik area ini. Seolah-olah gugusan bukit tersebut menjadi bingkai alam yang sempurna bagi kebun teh ini.

Objek wisata Kebun Teh Ngelinggo yang dikelola Kelompok Desa Wisata dengan retribusi masuk ke spot-spot atau destinasi harus berada dibawah payung hukum. Saat ini, Desa Wisata mengajak BUMKAL Pagerharjo sebagai unit usaha yang melindungi legalitas dari retribusi tersebut. BUMKAL menyediakan atau pengadaan karcis atau retribusi masuk, sedangkan pembangunan dan pengelolaannya oleh Desa Wisata tersebut. Untuk pembagian persentasinya, belum diketahui pasti. (Widayat)

3. Keadaan Geografis

Saat cuaca sedang cerah, dari kebun teh ini akan tampak barisan delapan gunung yang terlihat gagah. Panorama ini dapat menjadikan visual delapan gunung sebagai *background* fotografi. Komplek perkebunan teh Ngelinggo terletak di dataran tinggi yaitu sekitar 800 meter di atas permukaan laut (dpl). Area tanam kebun teh ini memiliki luas sekitar 72 hektar dengan rincian 57 hektar merupakan kebun teh yang produktif dan 15 hektar merupakan kebun yang kurang produktif (Baca juga: Air Terjun Siluwok). Kebun Teh Ngelinggo berada di ketinggian 900 sampai 1.000 mdpl. Karena lokasinya di dataran tinggi seperti Dieng, udara di tempat ini begitu bersih dan segar.

Secara administratif, wisata Kebun Teh Nglinggo terletak pada dua buah dusun, yaitu Nglinggo Barat dan Nglinggo Timur di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta titik koordinat berdasarkan aplikasi Google Maps yaitu 7.647° S, 110.1415° E. Jika dilihat dari peta wilayah Jawa Tengah, letak Kebun Teh Nglinggo berbatasan dengan wilayah Kabupaten Magelang dan Purworejo. Jalur utama Yogyakarta-Purworejo akan melewati Kawasan Samigaluh yang dekat dengan Kebun Teh Nglinggo.

Luas Kebun Teh Nglinggo adalah ± 3 ha di yang terdiri dari $\pm 0,5$ ha milik Yayasan Gereja selebihnya milik warga masyarakat. Adapun tanah milik Sultan Ground ± 600 m berupa tebing-tebing atau gunung Jaran yang dibangun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pada mulanya, dibukanya wisata Kebun Teh Nglinggo ini berdasarkan usulan para penggemar otomotif mobil *jeep* yang melihat adanya potensi wisata alam yang masih bisa dikembangkan lebih jauh. Para *driver Jeep* sering melakukan jelajah medan di tempat ini. Kebetulan masyarakat setempat banyak juga yang ikut ke dalam komunitas ini sehingga terjadilah komunikasi serius untuk mengembangkan potensi wisata alam perbukitan teh Nglinggo. Fasilitas Kebun Teh Nglinggo cukup lengkap bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Kebun Teh Nglinggo, termasuk: toilet, mushola, *jeep*, tempat parkir, warung makanan dan minuman, penginapan; dan tempat istirahat.

5. Struktur Kepengurusan Objek Wisata Kebun Teh Nglinggo

Tabel II.14 Pengurus Desa Wisata Nglinggo

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Widayat	Lurah	Penasehat
2	Agustinus Sulistyio	Ketua Pokdarwis	Penasehat
3	Teguh Kumoro	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4	Antonius Nugroho	Tokoh Masyarakat	Ketua Umum
5	Hadrianus	Tokoh Masyarakat	Ketua
6	Edy Tamsil	Tokoh Masyarakat	Ketua
7	Sigit Setiawan	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
8	Yusuf Nungki	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
9	Sri Handayani	Tokoh Masyarakat	Bendahara
10	Tri Siska	Tokoh Masyarakat	Bendahara
11	Suraji	Tokoh Masyarakat	Seksi Kebersihan
12	Anggi Agastha	Tokoh Masyarakat	Seksi Kebersihan
13	Abim	Tokoh Masyarakat	Seksi Tour dan Operator
14	Diaz	Tokoh Masyarakat	Seksi Tour dan Operator
15	Ariyanto	Tokoh Masyarakat	Seksi Tour dan Operator
16	Heri Bonbon	Tokoh Masyarakat	Seksi Tour dan Operator
17	Riris Awaludin	Tokoh Masyarakat	Seksi Seni dan Budaya
18	Tari	Tokoh Masyarakat	Seksi Seni dan Budaya
19	Evi	Tokoh Masyarakat	Seksi Kuliner
20	Asriani	Tokoh Masyarakat	Seksi Kuliner
21	Nurkito	Tokoh Masyarakat	Seksi Keamanan
22	Dwi Yoga	Tokoh Masyarakat	Seksi Keamanan
23	Makful	Tokoh Masyarakat	Seksi Teknisi
24	Imam	Tokoh Masyarakat	Seksi Teknisi
25	Taufik J	Tokoh Masyarakat	Seksi Acara
26	Y. Haryanto	Tokoh Masyarakat	Seksi Acara
27	Wulan	Tokoh Masyarakat	Seksi P3K
28	Tri Wahyono	Tokoh Masyarakat	Seksi P3K
29	Sugito	Tokoh Masyarakat	Seksi Humas
30	Sutarto	Tokoh Masyarakat	Seksi Humas
31	Agata B. Rahayu	Tokoh Masyarakat	Seksi Logistik
32	Nasriana	Tokoh Masyarakat	Seksi Logistik
33	Wakhid	Tokoh Masyarakat	Seksi Promosi
34	Reni	Tokoh Masyarakat	Seksi Promosi
35	Rara	Tokoh Masyarakat	Seksi Promosi
36	Wahyudi	Tokoh Masyarakat	Seksi Dokumentasi
37	Jumantoro	Tokoh Masyarakat	Seksi Dokumentasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikuntoro, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- A, Muri Yusuf. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*. Depok: Rajawali Pers.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dayan, Anto, 1986. *Pengantar Metode Statistik II*, Jakarta: LP3ES.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat Undang-Undang Desa*. Jakarta: Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eko, Sutoro. 2015. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD ACCESS.
- Eko,Sutoro. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD “APMD”
- Moleong Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Oxfam Internasional. 2017. *Menuju Indonesia yang Lebih Setara*. Oxford: Oxfam GB.
- Sasono, Adi. 2013. *Menjadi Tuan di Negeri Sendiri: Pergulatan Kerakyatan, Kemartabatan, dan Kemandirian*. Jakarta: Grafindo Books Media.
- Supranto, J. 2000. *Teknik Sampling Untuk Survey dan Eksperimen*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Rosdakarya.

Jurnal, Skripsi, dan Artikel

- Akbar, Gaza Ahmad Malik. dkk. *Analisis Kemampuan Penalaran dan Self Confidence Siswa SMA dalam Materi Peluang*. Journal of Education Volume 1, Nomor 1, Desember 2018.
- Baskoro dan Cecep Rukendi. *Membangun Kota Pariwisata Berbasis Komunitas: Suatu Kajian Teoritis*. Jurnal Kepariwisata Indonesia, Volume III, Nomor 1, 2008.
- Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma dan Azra Prabowo. *Strategi Pengelolaan Objek Wisata Mangrove Pandansari sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes*. Jurnal Tata Sejuta Volume 6, Nomor 4, September 2020.
- Eko, Sutoro. 2020. *Pemetaan Penelitian Pemerintahan*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2020. *Memahami Pemerintahan*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. *Ilmu Pemerintahan: Anti pada Politik, Lupa pada Hukum, dan Enggan pada Administrasi*. Governabilitas: Volume 1, Nomor 1, Juni 2020.
- Eko, Sutoro. *Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*. Governabilitas: Volume 2, Nomor 1, Juni 2021.
- Fairuza, M. *Kolaborasi Antarstakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata: Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi*. Kebijakan dan Manajemen Publik, 5, 2017.
- Hamidah, N. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata: Studi Kasus Objek Wisata Bukit Jamur di Kecamatan Bungah Gresik*. Journal of Chemical Information and Modeling 53 (9). 2013.
- Hermansah, Anggi. *Pengelolaan Objek Wisata Citumang oleh Karang Taruna Desa Bojong dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Moderat Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019.
- Leman, L. A. *Kolaborasi Antarstakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Religi Sunan Giri di Kabupaten Gresik*. Kebijakan dan Manajemen Publik 6 (2), 2018.
- Marlina, Eka. *Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Di Desa Cikupa, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis*. Jurnal Moderat Volume 5, Nomor 1, Februari 2019.
- Mutiawati, T dan Sudarmo. *Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan, Kota Pekalongan*. Jurnal Wacana Publik, 1 (2), 2017.